



Analisis Peran Komite Sekolah/Madrasah di SMP/MTs Sekecamatan Namlea Kabupaten Buru

Analysis of the Role of School/Madrasah Committees in Junior High Schools (SMP/MTs) in Namlea District, Buru Regency

Safira Hasanah Aulia Ode¹, Jantje E. Lekatompessy¹

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura

*Correspondence: safirahasanaauliaode@gmail.com

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received: 04-04-2025 Revised: 01-05-2025 Accepted: 23-05-2025 Published: 12-06-2025	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam mendukung tata kelola pendidikan di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Fokus kajian mencakup empat fungsi utama komite, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus pada tiga satuan pendidikan yang memiliki latar berbeda, yakni SMP Negeri, SMP swasta, dan madrasah swasta. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran komite sangat dipengaruhi oleh keterbukaan kepemimpinan sekolah dan intensitas komunikasi dengan masyarakat. Komite di sekolah yang partisipatif menjalankan peran strategis dalam pengambilan keputusan, mendukung kegiatan sekolah secara sukarela, serta melakukan pengawasan terhadap program dan perilaku siswa. Sebaliknya, di sekolah dengan keterbatasan komunikasi, peran komite cenderung pasif dan administratif. Sebagai mediator, komite berfungsi menjembatani kepentingan orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah dalam membangun pemahaman bersama. Kata kunci: komite sekolah, peran strategis, tata kelola
	ABSTRACT <i>This study aims to describe the role of school committees in supporting educational governance in Namlea District, Buru Regency. The focus of the research includes four main functions of the committee: advisory, supportive, supervisory, and mediating roles. A qualitative approach was employed using a case study method at three educational institutions with different backgrounds, namely a public junior high school, a private junior high school, and a private Islamic school (madrasah). Data collection techniques involved in-depth interviews, observation, and documentation. The findings show that the effectiveness of the committee's role is strongly influenced by the openness of school leadership and the intensity of communication with the community. Committees in participatory schools played strategic roles in decision-making, voluntarily supporting school activities, and monitoring programs and student behavior. Conversely, in schools with limited communication, committee roles tended to be passive and administrative. As mediators, committees served to bridge the interests of parents, the community, and the school in fostering mutual understanding.</i> <i>Keywords: school committee, strategic role, educational governance.</i>



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Citation: Ode, S. H. A., & Lekatompessy, J. E. (2025). Analisis Peran Komite Sekolah/Madrasah di SMP/MTs Sekecamatan Namlea Kabupaten Buru. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. 4(2), 217-227. <https://doi.org/10.30598/jpguvol4iss2pp217-227>

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat, yang salah satunya diwujudkan melalui lembaga komite sekolah atau madrasah. Komite berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat dalam merancang, mengawal, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kehadiran komite memperkuat akuntabilitas publik dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah di kalangan masyarakat (Muttaqin & Nurwati, 2021; Ramadhani, 2025). Komite tidak hanya menjadi instrumen formal, melainkan kekuatan sosial yang mendukung transparansi, efisiensi, dan relevansi pendidikan bagi masyarakat sekitar (Firman, 2018).

Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), komite sekolah berperan sebagai mitra pengambilan keputusan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokratis. Keterlibatan masyarakat melalui komite memungkinkan kebijakan pendidikan diambil secara partisipatif dan kontekstual. Komite mendukung adaptasi program sekolah terhadap kebutuhan lokal, serta menjadi sarana kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan (Irawan et al., 2021; Suyitno, 2021). Dengan partisipasi komite, program sekolah lebih mampu menjawab tantangan lingkungan dan memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan masyarakat (Karlina et al., 2021).

Peraturan resmi seperti Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan PMA No. 16 Tahun 2020 menjelaskan empat fungsi utama komite sekolah: sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Fungsi-fungsi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi komite dalam mendampingi sekolah. Implementasi keempat fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran peran, dukungan kepala sekolah, dan kapasitas anggota komite sendiri (Nurlita & Bachtiar, 2021; Ramli, 2021). Meski sudah diatur secara formal, pelaksanaan peran komite di lapangan seringkali belum maksimal karena

minimnya pelatihan, pemahaman, atau komunikasi yang sinergis (Supriadi, 2017).

Komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan komite menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi peran komite. Kepala sekolah yang proaktif cenderung mampu menggerakkan komite untuk terlibat lebih jauh dalam mendukung program-program sekolah. Komunikasi yang intensif menciptakan rasa percaya dan mendorong sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat, termasuk dalam hal pendanaan, ide inovatif, serta pelaksanaan program ekstrakurikuler (Fitri & Asmendri, 2023; Suharti, 2021). Tanpa relasi yang kuat ini, peran komite seringkali tidak efektif, bahkan hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi (Haryanti et al., 2025).

Fungsi pengawasan komite sekolah menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi dan integritas tata kelola pendidikan. Komite bertindak sebagai pengontrol yang memantau pelaksanaan anggaran dan kebijakan agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Ketika pengawasan dilakukan secara aktif dan partisipatif, potensi penyimpangan kebijakan bisa ditekan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah meningkat (Daud, 2024; Karman, 2017). Peran ini krusial untuk mendorong budaya keterbukaan dan laporan pertanggungjawaban yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan publik.

Sebagai pemberi pertimbangan, komite dapat memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan sekolah agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Keterlibatan ini bukan hanya membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjamin bahwa kebijakan yang dibuat relevan dan berkelanjutan. Dalam berbagai studi, masukan komite terbukti memperkaya sudut pandang sekolah dalam menyusun program kerja dan pengembangan kurikulum lokal (Andrianto, 2025; Rita, 2018). Ini juga menciptakan ruang diskusi yang sehat antara pendidik, orang tua, dan masyarakat.

Sebagai mediator, komite sekolah berfungsi untuk meredam potensi konflik

antara sekolah dan masyarakat. Fungsi ini sangat dibutuhkan ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kebijakan internal, pembiayaan pendidikan, atau penanganan kasus siswa. Komite menjadi jembatan komunikasi dan penyalur informasi, membantu menyampaikan aspirasi orang tua dan menjelaskan kebijakan sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman (Fahlevi, 2020; Seriyanti et al., 2020). Dengan begitu, harmoni sosial dalam ekosistem pendidikan tetap terjaga dan proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nyata empat fungsi strategis komite sekolah di tingkat SMP dan MTs, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik sosial beragam. Fokus utama diarahkan pada bagaimana pelibatan komite memengaruhi mutu pendidikan dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris dan kontekstual, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fungsi normatif komite, melainkan juga realitas dan tantangan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih partisipatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan secara mendalam peran komite sekolah/madrasah di SMP/MTs di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara komprehensif dan kontekstual, khususnya dalam memahami dinamika pelibatan komite dalam penyelenggaraan pendidikan. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh makna dan pemahaman mendalam dari interaksi sosial, praktik kebijakan, dan respon para aktor pendidikan terhadap peran komite. Fokus utama diarahkan pada dimensi pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator yang dijalankan

oleh komite sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan masing-masing.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap berbagai informan kunci, termasuk ketua komite, kepala sekolah/madrasah, guru, orang tua/wali siswa, siswa, dan pengawas. Teknik ini bertujuan menggali informasi secara langsung mengenai implementasi dan efektivitas peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pendidikan. Selain itu, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti laporan kegiatan, notulensi rapat, foto dokumentasi, serta arsip perencanaan dan evaluasi sekolah. Kombinasi dua teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat triangulatif, memperkuat keabsahan dan kedalaman analisis fenomena yang dikaji.

Keabsahan data dijamin melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan untuk mendapatkan perspektif yang beragam terhadap isu yang diteliti. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan wawancara dan dokumentasi sebagai cara memperoleh data yang saling melengkapi dan menguatkan. Validitas temuan dijaga dengan memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten dan kredibel. Selain itu, peneliti secara reflektif mencatat hasil observasi lapangan dan mengevaluasi potensi bias dalam interpretasi data. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran akurat dan meyakinkan mengenai kontribusi nyata komite terhadap manajemen pendidikan.

Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring, memilah, dan merangkum data mentah menjadi informasi penting yang relevan dengan fokus

penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif dan matriks untuk memudahkan peneliti dalam mengenali pola dan hubungan antar tema. Proses ini dilakukan secara iteratif dan berulang hingga data mencapai kejenuhan. Kesimpulan penelitian ditarik melalui proses verifikasi, yaitu pengujian silang terhadap data yang telah dianalisis untuk memastikan validitas interpretasi. Analisis ini membantu menyusun temuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Komite Sebagai Pemberi Pertimbangan

Komite sekolah di SMP Darul Hidayah belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan secara optimal. Keterlibatan komite terbatas hanya pada penandatanganan dokumen RKAS, tanpa dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan atau program sekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan komunikasi karena sebagian besar orang tua siswa tinggal di luar wilayah Namlea dan anak-anak mereka diasramakan. Akibatnya, partisipasi orang tua dalam rapat atau diskusi sekolah sangat minim. Namun demikian, komite tetap berperan dalam program keagamaan seperti Khatam Al-Qur'an dan Tahfidz, dengan menjembatani kebutuhan anggaran antara pihak sekolah dan wali siswa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak aktif dalam pengambilan keputusan strategis, komite tetap berkontribusi pada pelaksanaan program tahunan yang bersifat khusus dan rutin.

Berbeda dari SMP Darul Hidayah, komite MTs Miftahul Khair Namlea menunjukkan keterlibatan yang lebih substansial dalam fungsi pemberi pertimbangan. Komite dilibatkan secara aktif dalam merumuskan visi, misi, serta tujuan madrasah, termasuk menyusun program-program unggulan seperti Wisuda Tahfidzul Al-Qur'an. Meski tidak memiliki DIPA karena statusnya sebagai madrasah swasta, MTs ini tetap melibatkan komite dalam forum-forum pengambilan keputusan

penting. Kepala madrasah memandang keputusan yang melibatkan komunitas harus dibahas bersama dengan berbagai pihak termasuk ketua komite, guru, dan yayasan. Pandangan ini memperkuat posisi komite sebagai mitra strategis dalam proses manajemen pendidikan. Selain itu, keterlibatan komite dalam pembangunan fisik madrasah menunjukkan bahwa pertimbangan mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada pengembangan kelembagaan.

SMP Negeri 14 Buru juga memperlihatkan kinerja komite sebagai pemberi pertimbangan yang berjalan secara optimal dan terstruktur. Komite tidak hanya dilibatkan dalam penentuan RKAS, tetapi juga dalam penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), serta dokumen perencanaan strategis lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler seperti Marching Band pun tak luput dari masukan dan pertimbangan komite, membuktikan bahwa mereka tidak sekadar pelengkap administrasi, melainkan turut aktif dalam pembangunan karakter siswa. Kepala sekolah menganggap komite sebagai mitra kerja utama dalam pengembangan mutu pendidikan dan mendorong kolaborasi terbuka dengan seluruh stakeholder. Dengan demikian, model partisipasi yang ditunjukkan di SMP Negeri 14 Buru dapat dijadikan contoh praktik baik penerapan peran komite sekolah dalam konteks desentralisasi pendidikan.

Hasil penelitian secara umum mengindikasikan bahwa keberhasilan peran komite sebagai pemberi pertimbangan sangat bergantung pada pola hubungan antara pihak sekolah/madrasah dengan komunitasnya. Keterlibatan aktif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh sikap terbuka kepala sekolah dan kesiapan komite itu sendiri dalam menjalankan fungsi strategis. Sekolah yang membangun budaya kolaboratif dan menghargai masukan eksternal cenderung lebih berhasil memanfaatkan peran komite secara optimal. Sebaliknya, keterbatasan geografis dan komunikasi seperti yang terjadi di SMP Darul Hidayah menjadi

penghambat utama efektivitas peran komite. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas dan fasilitasi komunikasi agar komite di semua sekolah mampu berperan maksimal dalam mendukung tata kelola pendidikan yang partisipatif dan akuntabel.

B. Peran Komite Sebagai Pendukung

Peran komite sebagai pendukung sangat terlihat pada ketiga sekolah yang menjadi subjek penelitian, yaitu SMP Darul Hidayah, MTs Miftahul Khair Namlea, dan SMP Negeri 14 Buru. Masing-masing komite terlibat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun material. Di SMP Darul Hidayah, dukungan diberikan melalui penggalangan donasi dari pihak luar sekolah untuk mendukung kebutuhan siswa asrama, karena banyak siswa berasal dari luar daerah dan tidak tinggal bersama orang tua. Komite bekerja sama dengan yayasan dan masyarakat untuk mencari donatur, mengingat keterbatasan anggaran sekolah. Dukungan tersebut sangat membantu program-program unggulan sekolah yang bersifat keagamaan maupun sosial. Bantuan yang diberikan umumnya berupa barang kebutuhan pokok dan perlengkapan siswa, bukan dalam bentuk uang tunai, guna memastikan transparansi dan tepat sasaran.

Di MTs Miftahul Khair Namlea, peran komite sebagai pendukung terlihat dalam partisipasi aktif mereka pada pembangunan gedung madrasah serta pelaksanaan Wisuda Tahfidzul Al-Qur'an. Komite mengoordinasi orang tua dan masyarakat sekitar untuk turut serta memberikan kontribusi nyata dalam bentuk tenaga, pemikiran, serta sumbangan barang yang dibutuhkan. Kegiatan ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan dan komitmen masyarakat terhadap kemajuan lembaga pendidikan berbasis lokal. Dukungan yang diberikan tidak dipaksakan, melainkan berbasis kesukarelaan dan rasa memiliki. Meskipun tidak ada sistem iuran tetap, antusiasme masyarakat tetap tinggi karena komite menjalankan peran komunikatif yang

efektif. Madrasah menempatkan komite sebagai rekan strategis dalam menjalankan agenda-agenda penting yang menyangkut kehidupan siswa dan kelangsungan lembaga.

Sementara itu, komite SMP Negeri 14 Buru berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program-program sekolah, seperti Marching Band, Kemah Budaya, dan pelaksanaan Ujian Sekolah. Sekolah ini memfasilitasi ruang kolaborasi yang luas antara pihak sekolah dan komite, terutama dalam mengomunikasikan kebutuhan pendanaan kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Komite bertindak sebagai jembatan antara pihak sekolah dengan wali siswa untuk menggalang partisipasi sukarela dalam mendukung agenda sekolah. Dukungan yang diberikan juga mencakup logistik kegiatan dan dukungan moral agar siswa dapat mengikuti kegiatan nonakademik dengan semangat tinggi. Kegiatan yang bersifat kebudayaan dan ekstrakurikuler dianggap penting dalam pembentukan karakter siswa, sehingga komite merasa perlu terlibat secara langsung. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sebagai pendukung bersifat strategis dalam menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Ketiga sekolah dalam penelitian menunjukkan bahwa program dan kegiatan sekolah akan sulit terlaksana tanpa keterlibatan dan kontribusi aktif komite. Meskipun tidak ada kewajiban iuran formal, komite mampu mendorong dukungan sukarela dari orang tua dan mitra sekolah. Kegiatan yang didukung mencakup aspek akademik dan nonakademik, serta pembangunan fisik dan spiritual siswa. Komite yang menjalankan fungsi pendukung secara maksimal mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan memperkuat partisipasi sosial dalam pendidikan. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya kepercayaan antara sekolah dan masyarakat dalam

membangun pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

C. Peran Komite Sebagai Pengontrol

Peran komite sebagai pengontrol di SMP Darul Hidayah terlihat dari keterlibatannya dalam memverifikasi dokumen perencanaan seperti RKAS, meskipun keterlibatan ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pengawasan strategis yang menyeluruh. Komite lebih sering hadir saat dokumen sudah disiapkan oleh pihak sekolah, dan hanya diminta tanda tangan sebagai bentuk legalitas. Meskipun demikian, komite pernah dilibatkan dalam proses akreditasi sekolah tahun 2021 sebagai narasumber eksternal yang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sekolah. Ini menunjukkan bahwa meski peran pengawasan belum optimal, terdapat potensi partisipasi komite untuk berkontribusi dalam aspek penjaminan mutu pendidikan. Namun, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan sekolah belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pihak komite.

Berbeda halnya dengan MTs Miftahul Khair Namlea, komite di madrasah ini memaknai peran pengontrol sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Komite ikut serta dalam memantau pelaksanaan program unggulan seperti pembangunan gedung madrasah dan kegiatan Wisuda Tahfidzul Al-Qur'an. Komite melakukan pengawasan terhadap alokasi sumber daya dan proses pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan akuntabel. Menurut kepala madrasah, setiap keputusan strategis selalu melibatkan diskusi lintas pihak, termasuk komite. Hal ini mendorong terciptanya proses check and balance antara pihak internal dan eksternal madrasah. Kehadiran komite sebagai pengontrol tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga memberi rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Komite berfungsi sebagai penjaga integritas program madrasah yang mengedepankan kolaborasi partisipatif.

Di SMP Negeri 14 Buru, peran pengontrol dari komite tampak lebih komprehensif karena menyentuh aspek kebijakan, anggaran, dan perilaku siswa. Komite dilibatkan dalam proses perencanaan seperti penyusunan KOSP dan RKAS, termasuk memantau alokasi dana yang bersumber dari kontribusi orang tua. Selain itu, ketua komite yang juga merupakan tokoh masyarakat (Imam Masjid) turut mengawasi pergaulan siswa di lingkungan luar sekolah. Menurut kepala sekolah, komite dianggap sebagai mitra utama yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya aspek administratif, komite juga berperan dalam menjaga etika dan moral siswa sebagai bagian dari sistem kontrol sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa komite dapat menjadi elemen pengawas yang menghubungkan aspek manajerial dan karakter pendidikan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas peran pengontrol sangat dipengaruhi oleh kedekatan hubungan antara sekolah dan komite, serta kapasitas komite dalam memahami tugas pengawasan. Di sekolah yang menempatkan komite sebagai mitra strategis, proses pengawasan dapat berjalan lebih terarah, bahkan menjangkau area perilaku siswa dan pengambilan kebijakan. Sebaliknya, di sekolah yang hanya memosisikan komite secara administratif, fungsi pengawasan menjadi minim dan bersifat formalitas. Perlu adanya penguatan kapasitas komite melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka mampu memahami standar pengelolaan pendidikan dan akuntabilitas keuangan sekolah. Dengan demikian, komite dapat menjalankan peran pengontrol secara lebih proaktif, berorientasi mutu, dan mendukung praktik tata kelola sekolah yang transparan dan bertanggung jawab.

D. Peran Komite Sebagai Mediator

Peran komite sebagai mediator di SMP Darul Hidayah lebih bersifat informal dan terbatas pada menjembatani komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa. Dalam

praktiknya, komite hanya diundang pada saat rapat besar yang melibatkan wali murid, khususnya ketika sekolah memerlukan dukungan atau masukan. Komite menerima saran dari orang tua secara lisan dan menyampaikannya langsung dalam forum rapat, namun belum pernah melakukan dokumentasi atau pelaporan tertulis atas masukan tersebut. Peran ini belum menyentuh ranah negosiasi strategis atau advokasi kebijakan, karena keterlibatan komite masih pasif dan reaktif. Hambatan geografis, karena banyak wali siswa tinggal jauh dari lokasi sekolah, turut mempersulit keterlibatan rutin komite dalam interaksi intensif antara pihak sekolah dan orang tua.

Sementara itu, di MTs Miftahul Khair Namlea, peran komite sebagai mediator berlangsung lebih dinamis. Komite aktif membangun komunikasi antara madrasah dan orang tua/wali siswa melalui berbagai pertemuan dan diskusi informal. Dalam menjembatani aspirasi, komite tidak hanya menyampaikan masukan orang tua kepada pihak madrasah, tetapi juga melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk mencapai kesepahaman bersama. Misalnya, dalam pelaksanaan program Wisuda Tahfidzul Al-Qur'an, komite membantu mengoordinasi kebutuhan dan harapan orang tua terhadap kualitas acara, sekaligus menjelaskan kebijakan internal madrasah. Komite juga berperan mengelola ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan fisik dan layanan madrasah, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Hubungan ini mencerminkan peran mediasi yang strategis dalam menjaga keharmonisan dan kepercayaan antara lembaga pendidikan dan komunitasnya.

Di SMP Negeri 14 Buru, peran mediator dijalankan komite dengan sangat aktif dan struktural. Komite secara rutin menyampaikan keluhan, saran, dan ide dari orang tua kepada kepala sekolah dalam bentuk diskusi maupun usulan tertulis. Kepala sekolah menilai komite sebagai mitra utama dalam mengembangkan kualitas pelayanan pendidikan, karena dapat mengidentifikasi masalah dari sisi eksternal sekolah. Komite juga membantu menciptakan solusi terhadap berbagai isu

yang muncul, termasuk dalam pengawasan sosial siswa di luar sekolah. Kegiatan seperti diskusi pascarapat orang tua, pendampingan kegiatan ekstrakurikuler, dan penyaluran bantuan masyarakat dilakukan melalui koordinasi komite. Dengan keterlibatan ini, peran komite tidak hanya sebagai juru bicara orang tua, tetapi juga sebagai agen harmonisasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sebagai mediator sangat tergantung pada pola komunikasi yang terbangun antara pihak sekolah dan masyarakat. Di sekolah dengan budaya dialog yang baik, komite berfungsi sebagai saluran aspirasi dan katalisator penyelesaian masalah. Namun di lingkungan yang partisipasinya rendah, peran ini cenderung tidak berjalan efektif. Untuk memperkuat peran mediasi komite, sekolah perlu menyediakan ruang komunikasi yang terbuka dan melibatkan komite dalam forum strategis secara terencana. Selain itu, pelatihan keterampilan komunikasi dan mediasi bagi anggota komite akan sangat membantu dalam memperkuat posisi mereka sebagai penghubung. Dengan demikian, komite dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Pembahasan

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penelitian ini memperlihatkan variasi praktik antara sekolah swasta dan negeri. Temuan ini sejalan dengan studi Ramadhani (2025) yang menyatakan bahwa komite di sekolah negeri cenderung lebih difungsikan secara struktural dan formal, sedangkan di sekolah swasta, peran tersebut lebih bersifat informal dan bergantung pada inisiatif kepala sekolah. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Ismail (2020), bahwa dukungan manajerial dari kepala sekolah sangat menentukan efektivitas pelibatan komite dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas fungsi

pertimbangan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan partisipatif dan keterbukaan institusi pendidikan terhadap saran eksternal.

Penelitian ini juga menguatkan pandangan Nurlita & Bachtiar (2021) bahwa keberhasilan komite dalam memberikan pertimbangan bergantung pada adanya ruang dialog yang terstruktur. Di SMP Negeri 14 Buru, keterlibatan komite dalam penyusunan KOSP menjadi bukti bahwa kolaborasi konkret dapat terjadi jika sekolah menginstitusikan peran komite dalam siklus manajemen sekolah. Dalam konteks ini, komite tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi juga kontributor substansial terhadap perencanaan strategis. Temuan ini berkontribusi pada penguatan literatur partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang menempatkan komite sebagai mitra sejajar dalam proses transformasi sekolah (Irawan et al., 2021).

Dalam aspek pendukung, hasil penelitian menegaskan temuan Hardiana & Sholihah, (2024) yang menunjukkan bahwa kontribusi komite tidak selalu dalam bentuk dana, melainkan juga berupa dukungan moral, logistik, dan sosial. Komite di MTs Miftahul Khair misalnya, memainkan peran sentral dalam mobilisasi masyarakat untuk pembangunan fisik madrasah. Ini menegaskan bahwa keberhasilan komite sebagai pendukung sangat terkait dengan modal sosial dan jaringan komunitas. Keterlibatan masyarakat yang bersifat sukarela, seperti ditunjukkan oleh Puspasari (2017), memiliki daya tahan lebih tinggi dibanding kontribusi yang bersifat instruktif atau dipaksakan. Konsep *ownership* terhadap lembaga pendidikan lokal menjadi faktor pendorong utama keterlibatan tersebut.

Hasil ini juga sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969) dalam konteks modern, sebagaimana diadaptasi oleh Hermansyah (2024), yang menyatakan bahwa peran masyarakat dalam pendidikan harus bertransformasi dari tokenism menjadi *partnership*. Dukungan komite dalam kegiatan kultural dan spiritual seperti di SMP Darul Hidayah mencerminkan bentuk

partisipasi yang telah melampaui sekadar keterlibatan simbolik. Komite menjadi motor penggerak yang menghubungkan kebutuhan program sekolah dengan potensi dukungan masyarakat, sehingga program-program dapat berjalan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, sekolah yang mampu menumbuhkan semangat kolaborasi cenderung mendapat dukungan berkelanjutan dari komite.

Peran pengontrol yang ditunjukkan komite dalam penelitian ini memperkuat temuan Amsor (2021) bahwa pengawasan oleh komite sering kali bersifat administratif, dan belum menyentuh aspek kebijakan atau anggaran secara kritis. Namun, sekolah seperti SMP Negeri 14 Buru menunjukkan pengecualian, karena komite diberikan peran dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran dan memantau perilaku siswa. Hal ini menegaskan bahwa kapasitas dan kepercayaan kepala sekolah terhadap komite menjadi prasyarat penting agar fungsi pengawasan tidak menjadi formalitas. Menurut Liniarti (2022), pemberdayaan komite dapat mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi dalam tata kelola pendidikan.

Komite yang menjalankan fungsi pengontrol secara aktif, seperti di MTs Miftahul Khair, menunjukkan bahwa pengawasan dapat berjalan efektif ketika didukung oleh proses dialog yang inklusif. Hal ini sejalan dengan temuan Nurlita & Bachtiar (2021) bahwa pengawasan berbasis kolaborasi lebih mampu mendorong kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaan program sekolah. Sekolah yang menyertakan komite dalam evaluasi program tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan. Komite, dalam posisi ini, bertindak sebagai penjaga nilai integritas dan akuntabilitas publik, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan dan program strategis.

Pada dimensi mediasi, hasil penelitian ini menegaskan bahwa komite sekolah dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif jika dibekali dengan kapasitas komunikasi dan dukungan sistemik. Temuan ini sejalan dengan studi Savira et al. (2023), yang menyebutkan bahwa konflik antara

sekolah dan masyarakat dapat diminimalkan jika komite berperan sebagai mediator dialogis. Komite di MTs Miftahul Khair dan SMP Negeri 14 Buru menjalankan fungsi ini melalui mekanisme diskusi, penyampaian aspirasi, dan penguatan komunikasi dua arah. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan deliberatif dalam penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif.

Fungsi mediasi yang dijalankan oleh komite juga dapat mengurangi jarak psikologis antara sekolah dan komunitas. Dalam literatur pendidikan, pendekatan ini dikenal dengan konsep “*school-community bridging*” (Muttaqin & Nurwati, 2021), yang menjelaskan bahwa sekolah yang mampu menjembatani ekspektasi masyarakat lebih cenderung menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif. Penelitian ini menegaskan bahwa hambatan geografis dan minimnya komunikasi di beberapa sekolah menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui sistem komunikasi digital, pelatihan fasilitasi konflik, dan penguatan peran komite sebagai agen dialog.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menambah khazanah ilmiah mengenai dinamika implementasi empat fungsi komite sekolah. Perbandingan dengan berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan komite sangat ditentukan oleh sinergi antara sekolah dan masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah, serta kapasitas anggota komite itu sendiri. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus mengarah pada peningkatan kapasitas komite melalui pelatihan, regulasi insentif, dan mekanisme partisipasi yang lebih sistematis. Dukungan dari dinas pendidikan dan yayasan perlu diperkuat agar komite tidak hanya menjadi simbol partisipasi, tetapi aktor strategis dalam reformasi pendidikan lokal (Ramli, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran komite sekolah/madrasah di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berjalan secara variatif dalam empat fungsi utama: pemberi pertimbangan, pendukung,

pengontrol, dan mediator. Peran komite optimal di sekolah yang membuka ruang partisipasi, memiliki kepemimpinan kolaboratif, serta menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat. Namun, pada beberapa sekolah swasta, keterlibatan komite masih bersifat administratif dan terbatas. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas anggota komite melalui pelatihan manajemen sekolah, komunikasi publik, dan pengawasan berbasis akuntabilitas. Sekolah juga disarankan melibatkan komite dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi program. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan perlu menyusun regulasi yang memperkuat posisi strategis komite sebagai mitra tata kelola pendidikan. Dengan penguatan tersebut, komite dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, serta menciptakan hubungan harmonis antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah sebagai pilar utama sistem pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsor, J. M. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menjalankan Fungsi Manajemen. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 1(2), 153–164. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v1i2.32547>
- Andrianto, E. (2025). Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah: Mendorong Keterlibatan Guru dan Siswa dalam Pengambilan Keputusan. *Social Science Academic*, 2(2). <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i2.6310>
- Daud, R. M. (2024). Revitalisasi Peran Komite dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 143–159. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i4.943>
- Fahlevi, R. (2020). Peran Serta Komite Sekolah dan Orang Tua Siswa dalam Meningkatkan Program Sekolah di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. *Jurnal Pendidikan Wahana Pendidikan Dasar*, 9(2), 61.

- <https://doi.org/10.54980/jpwpd.v9i2.103>
- Firman, F.-. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Sumatera Barat. *Center for Open Science*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/mvjw8>
- Fitri, L., & Asmendri, A. (2023). Hubungan Sinergi Antara Sekolah, Komite, Orangtua dan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Tsaqofah*, 3(1), 80–90.
<https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i1.774>
- Hardiana, T., & Sholihah, I. (2024). Komite Madrasah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Mabdaul Ulum Rowosari. *IHTIROM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.70412/itr.v3i1.68>
- Haryanti, T., Hambali, H., & Maulidar, M. (2025). Analisis Peran Komite Sekolah dalam Perencanaan Pengembangan Sekolah Dasar Negeri 71 Kota Banda Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 9(1), 425–434.
<https://doi.org/10.30601/dedikasi.v9i1.5557>
- Hermansyah, E. (2024). Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Kebijakan di Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 17(1).
<https://doi.org/10.24832/jpkp.v17i1.886>
- Irawan, E., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2021). Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi pada SMP Negeri 1 Surakarta. *JIPSINDO*, 8(1), 15–28.
<https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i1.38533>
- Ismail, S. (2020). Analisis Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Melaksanakan Manajemen Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]*.
<https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v1i3.5671>
- Karlina, N., Muliadi, M., & Sudarto, S. (2021). Analisis Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SD Gugus V Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *JPPSD: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 1(1), 22.
<https://doi.org/10.26858/pjppsd.v1i1.22960>
- Karman, O. (2017). Kontribusi Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 7(2).
<https://doi.org/10.17509/jap.v12i2.6370>
- Liniarti, S. L. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Di Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(6).
<https://doi.org/10.59818/jpm.v2i6.345>
- Muttaqin, Z., & Nurwati, N. (2021). Peran Komite Sekolah dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 85.
<https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.5988>
- Nurlita, H., & Bachtiar, M. (2021). Peran Controlling Agency Komite Sekolah dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di SMP Negeri. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 1(2), 118.
<https://doi.org/10.26858/jak2p.v1i2.9967>
- Puspasari, R. R. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Program Sekolah. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2(1), 17–23.
<https://doi.org/10.17977/um025v2i12.017p017>
- Ramadhani, S. N. (2025). Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu

- Sarana dan Prasarana Sekolah. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 20–26. <https://doi.org/10.23960/pdg.v11i2.682>
- Ramli, R. (2021). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 3(1), 147–163. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i1.155>
- Rita, H. (2018). Peran Komite dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang (Studi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah). *Conciencia*, 17(1), 70–80. <https://doi.org/10.19109/conciencia.v17i1.1583>
- Savira, R., Nasichah, & Labiq, A. (2023). Peran Komunikasi Interpersonal dalam Penyelesaian Konflik di Media Sosial. *Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 4(01), 37–43. <https://doi.org/10.24239/nosipakabelo.v4i01.2007>
- Seriyanti, N., Ahmad, S., & Destiniar, D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.3922>
- Suharti, I. I. S. (2021). Aktualisasi Peran dan Fungsi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sebagai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 1(1), 153–169. <https://doi.org/10.51878/educational.v1i1.104>
- Supriadi, A. (2017). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(2), 147–160. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i2.45>
- Suyitno. (2021). Pengaruh Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah Dan Peran Komite Terhadap Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah. Center for Open Science. <https://doi.org/10.35542/osf.io/h9r2q>